

## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA, PENELITIAN TERDAHULU, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS**

#### **2.1 Kajian Pustaka**

##### **2.1.1 Kemiskinan**

###### **2.1.1.1 Konsep Kemiskinan**

Kemiskinan yang terjadi di Indonesia terus bergulir seperti lingkaran yang tak pernah menemukan ujungnya. Kemiskinan yang terjadi sering dikaitkan dengan masalah pendapatan yang minim yang menyebabkan ketidak mampuan memenuhi kebutuhan pokok apalagi kebutuhan lain seperti pendidikan, kesehatan, rekreasi dan sebagainya.

Pengertian kemiskinan itu sendiri menurut Ibnu Khaldun (dalam Affandi dan Astuti, 2013, hlm.138) adalah sebagai berikut:

*Poverty is a process that is triggered by the decline of the political community that is not valid due to the lack of democracy that resulted in the emergence of a variety of evil. Poverty is not merely due to the economic dimension, but also influenced by other factor besides of the economy.*

Berdasarkan definisi tersebut, Ibnu Khaldun menjelaskan bahwa kemiskinan merupakan suatu proses yang disebabkan oleh penurunan politik umat yang tidak absah karena lemahnya demokrasi, hal ini mengakibatkan munculnya berbagai kejahatan dalam masyarakat. Kemiskinan ini tidak hanya diakibatkan karena faktor ekonomi saja, akan tetapi juga dipengaruhi oleh berbagai faktor lain.

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2015 mengungkapkan pengertian mengenai kemiskinan yaitu:

“Kemiskinan adalah ketidakmampuan memenuhi standar minimum kebutuhan dasar yang meliputi kebutuhan makan maupun non makan. Kemudian negara menetapkan suatu batas atau garis kemiskinan yang menjadi tolak ukur apakah dengan suatu kondisi masyarakat tersebut tergolong miskin atau tidak”.

Berdasarkan ungkapan tersebut, kemiskinan dapat dilihat dari ketidakmampuan seseorang atau keluarga yang tidak mampu untuk menyediaka

kebutuhan hidupnya. Selain itu, negara harus mengetahui kondisi masyarakat dan menentukan garis kemiskinan yang dialami oleh seseorang atau keluarga.

Berpijak pada konferensi ILO tahun 1976, Friedman membatasi kemiskinan sebagai minimnya kebutuhan dasar. Konferensi ILO tahun 1976 menetapkan bahwa kebutuhan dasar itu mencakup (Limbong, 2011, hlm 78):

1. Kebutuhan minimum dari suatu keluarga akan konsumsi privat (pangan, sandang, papan dan sebagainya)
2. Pelayanan esensial atas konsumsi kolektif yang disediakan oleh dan untuk komunitas pada umumnya (air minum sehat, sanitasi, tenaga listrik, angkutan umum, dan fasilitas kesehatan pendidikan)
3. Partisipasi masyarakat dalam pembuatan keputusan yang mempengaruhi mereka
4. Terpenuhinya tingkat kebutuhan dasar dalam kerangka kerja yang lebih luas dari hak-hak dasar manusia
5. Penciptaan lapangan kerja (*employment*) baik sebagai alat maupun tujuan dari strategi kebutuhan dasar.

Menurut Sumodiningrat (1998, hlm. 26), berpendapat bahwa:

Kemiskinan bersifat multidimensional dalam arti berkaitan dengan aspek sosial, ekonomi, budaya, politik dan aspek lainnya. Sedangkan Kartasasmitha mengatakan bahwa kemiskinan merupakan masalah dalam pembangunan yang ditandai dengan pengangguran dan keterbelakangan, yang kemudian meningkat menjadi ketimpangan. Lebih lanjut Kartasasmitha mengemukakan bahwa masyarakat miskin pada umumnya lemah dalam kemampuan berusaha dan terbatas aksesnya kepada kegiatan ekonomi sehingga tertinggal jauh dari masyarakat lainnya yang mempunyai potensi lebih tinggi.

Suyanto membatasi kemiskinan sebagai suatu ketidakberdayaan. Artinya, berdaya tidaknya seseorang sangat ditentukan dan dipengaruhi oleh determinan-determinan sosial-budayanya (seperti posisi, status dan wawasan yang dipunyainya). Semua fasilitas sosial yang dimilikinya pun ikut menentukan

keberdayaan kelak di dalam pengembangan dirinya di tengah masyarakat. Levitan lebih sederhana merumuskan kemiskinan sebagai suatu kondisi kekurangan barang-barang dan pelayanan-pelayanan yang dibutuhkan untuk mencapai suatu standar hidup yang layak (Limbong, 2011, hlm. 90).

Kemiskinan tidak hanya berkenaan dengan tingkat pendapatan, tetapi juga dari aspek sosial, lingkungan bahkan keberdayaan dan tingkat partisipasinya, sebagaimana digambarkan oleh Hajiji (2010, hlm. 14) mendefinisikan kemiskinan sebagai berikut:

*Poverty is hunger. Poverty is lack of shelter. Poverty is being sick and not being able to go to school and not knowing to know how to read. Poverty is not having a job, poverty is fear for the future, living one day at a time. Poverty is powerlessness, lack of representation and freedom.*

Berdasarkan berbagai pengertian kemiskinan di atas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa kemiskinan adalah suatu kondisi ekonomi dimana seseorang memiliki penghasilan yang rendah sehingga tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan pokok hidupnya secara layak.

Kemiskinan bukan hanya kurangnya pendapatan untuk memenuhi kebutuhan hidup pokok atau standar hidup yang layak, namun lebih dari itu esensi kemiskinan adalah menyangkut bagaimana keluarga miskin melakukan dan mengembangkan kegiatan perekonomiannya dalam upaya meningkatkan taraf kehidupan. Menentukan garis kemiskinan terdapat beberapa pendekatan, diantaranya adalah pendekatan pendapatan, pendekatan produksi dan pendekatan pengeluaran. Saat ini yang dilakukan BPS untuk menetapkan garis kemiskinan adalah dengan pendekatan pengeluaran.

Menurut Alliyah (2013, hlm. 3) berdasarkan dari berbagai konsep kemiskinan maka dibagi menjadi beberapa golongan yang akan dibahas sebagai berikut:

1. Kemiskinan absolut terjadi jika pendapatan seseorang dibawah garis kemiskinan, bahkan tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan minimum untuk dirinya sendiri (pangan, sandang, kesehatan, papan, pendidikan).

2. Kemiskinan relatif adalah kondisi seseorang yang hidup diatas garis kemiskinan, namun kondisi orang tersebut masih dibawah kemampuan masyarakat disekitarnya.
3. Kemiskinan kultural adalah sikap seseorang atau sekelompok masyarakat yang cenderung tidak mau berusaha memperbaiki tingkat kehidupannya meskipun ada usaha dari pihak lain yang berusaha membantu mereka keluar dari kondisi kemiskinan.
4. Kemiskinan struktural terjadi karena adanya struktur kebijakan pemerintah yang timpang atau tidak adil sehingga merugikan masyarakat miskin dalam jangka waktu yang cukup lama.

Suharto (2005, hlm. 132) membagi kemiskinan kedalam sembilan dimensi yang perlu dipertimbangkan, diantaranya:

- a. Ketidakmampuan memenuhi kebutuhan konsumsi dasar (pangan, sandang dan papan).
- b. Ketiadaan akses terhadap kebutuhan dasar lainnya (kesehatan, pendidikan, sanitasi yang baik, air bersih, dan transportasi).
- c. Ketiadaan jaminan masa depan (karena tiadanya investasi untuk pendidikan dan keluarga).
- d. Kerentanan terhadap guncangan faktor eksternal yang bersifat individual maupun massal.
- e. Rendahnya kualitas sumber daya manusia dan keterbatasan sumber daya alam
- f. Ketidakterlibatan dalam kegiatan sosial masyarakat.
- g. Ketiadaan akses terhadap lapangan kerja dan mata pencarian yang berkesinambungan.
- h. Ketidakmampuan untuk berusaha karena kecacatan fisik maupun mental
- i. Ketidakmampuan dan ketidakberuntungan sosial (anak terlantar, wanita korban tidak kekerasan rumah tangga, janda miskin, kelompok marginal dan terpencil).

Kemiskinan yang bersifat multi dimensi telah menyebabkan akibat yang beragam dalam kehidupan nyata (Tibyan, 2010, hlm. 16), antara lain:

- a. Membebani masyarakat dalam aspek sosial ekonomi

- b. Produktivitas dan kualitas masyarakat rendah
- c. Partisipasi masyarakat rendah
- d. Ketentraman dan ketertiban masyarakat menurun
- e. Menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap birokrasi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat
- f. Generasi yang akan datang memiliki potensi kemuduran mutu dan kualitas.

### 2.1.1.2 Kemiskinan Struktural

Kemiskinan struktural dipahami sebagai kemiskinan yang terjadi disebabkan ketidakmerataan terhadap sumberdaya karena struktur dan peran seseorang dalam masyarakat. Kemiskinan struktural menurut Soemardjan (1984, hlm. 84) adalah kemiskinan yang diderita oleh suatu golongan masyarakat karena struktur sosial masyarakat itu tidak dapat ikut menggunakan sumber sumber pendapatan yang sebenarnya tersedia bagi mereka. Menurutnya, kemiskinan struktural tidak menunjuk pada individual yang miskin karena malas bekerja atau tidak mendapatkan penghasilan, tetapi lebih karena struktur sosial masyarakat yang ada telah membatasi hak-hak mereka untuk mendapatkan/menggunakan sumber-sumber pendapatan yang tersedia untuk mereka.

Pada kondisi seperti itu kelompok masyarakat yang mengalami hal tersebut pada umumnya memiliki kesadaran akan nasibnya yang berbeda dengan kelompok/golongan lainnya. Kelompok tersebut misalnya, para petani yang tidak memiliki tanah sendiri atau para petani yang tanah miliknya begitu kecil sehingga hasilnya tidak cukup untuk memberi makan kepada dirinya sendiri dan keluarganya. Kemudian yang termasuk kelompok miskin struktural adalah para kaum buruh yang tidak terpelajar dan tidak terlatih, atau dengan kata lain dinamakan *unskilled laborers*. Selain itu, golongan miskin struktural meliputi juga para pengusaha tanpa modal dan tanpa fasilitas dari pemerintah, yang disebut juga golongan ekonomi lemah.

Kemiskinan struktural tidak hanya terwujud dengan kekurangan sandang dan kekurangan pangan saja, tetapi juga meliputi kekurangan fasilitas pemukiman yang sehat, kekurangan pendidikan, kekurangan komunikasi dengan dunia sekitarnya, dan termasuk juga kekurangan perlindungan dari hukum dan

pemerintah. Akan tetapi kesempatan-kesempatan tersebut seolah tertutupi dengan adanya gap antara kelompok miskin dan kelompok kaya, dimana orang kaya dapat dengan mudah mendapatkan semuanya itu, namun akses yang susah untuk kelompok miskin. Kemiskinan struktural timbul karena sebaliknya ada juga kecukupan atau kekayaan struktural, yaitu kekayaan yang dinikmati oleh golongan-golongan dalam masyarakat yang karena kedudukan dan peranannya dalam masyarakat lebih memudahkannya untuk memanfaatkan sumber sumber modal, pengetahuan, pengalaman dan keterampilan di dalam masyarakat, sehingga mereka tidak mengalami kemiskinan.

Orang-orang yang termasuk dalam golongan miskin secara struktural pada umumnya sadar akan nasibnya yang berbeda daripada nasib yang lebih baik dari golongan-golongan yang lain. Di antara para golongan ini mungkin ada yang ingin melepaskan diri dari belenggu kemiskinan dan mengusahakan kehidupan yang secara ekonomis lebih memuaskan, akan tetapi keinginan itu hanya akan dapat dicapai secara individual dan dengan usaha yang melebihi kemampuan rata rata yang dimiliki oleh para anggota lain dalam golongan itu. Sebagai golongan, sukar sekali bagi mereka untuk meningkatkan taraf kehidupan bagi para anggotanya secara menyeluruh, karena suatu usaha yang dapat memberikan keuntungan bagi seseorang belum tentu dapat diluaskan agar dapat menguntungkan seluruh golongan secara permanen (Soemardjan, 1984, hlm. 5).

### **2.1.1.3 Kemiskinan dalam Perspektif Islam**

Islam pada dasarnya membenarkan adanya konsep kemiskinan dalam masyarakat karena dalam Al Quran sendiri disebutkan beberapa kali kata ‘miskin’ ataupun ‘fakir’. Kemiskinan digunakan untuk menggambarkan kondisi masyarakat yang membutuhkan bantuan orang lain. Tetapi ajaran islam sendiri menunjukkan bahwa islam telah memberikan berbagai macam cara antisipatif untuk menghindari terjadinya kemiskinan.

Menurut bahasa, miskin berasal dari bahasa Arab yang sebenarnya menyatakan kefakiran yang sangat. Allah SWT menggunakan istilah itu dalam firman-Nya: *“...atau orang miskin yang sangat fakir”* (QS al-Balad: 16) Adapun

kata fakir yang berasal dari bahasa Arab: al-faqr, berarti membutuhkan (*al-ihthiyaj*). Allah SWT berfirman: “...lalu dia berdoa, “Ya Rabbi, sesungguhnya aku sangat membutuhkan suatu kebaikan yang Engkau turunkan kepadaku” (QS al-Qashash: 24).

Dalam pengertian yang lebih definitif, Syekh An-Nabhani (dalam Yuli, 2013, hlm. 103) mengategorikan yang punya harta (uang), tetapi tak mencukupi kebutuhan pembelanjannya sebagai orang fakir. Sementara itu, orang miskin adalah orang yang tak punya harta (uang), sekaligus tak punya penghasilan. Perbedaan kategori ini tepat untuk menjelaskan pengertian dua pos mustahiq zakat, yakni *al-fuqara* (orang-orang faqir) dan *almasakiin* (orang-orang miskin).

Dalam kehidupan sehari-hari kita terbiasa menyebut orang yang tidak mampu dalam kehidupan ekonomi dengan sebutan fakir miskin, padahal istilah fakir dan miskin memiliki pengertian yang berbeda. Menurut Yusuf Qardhawi fakir ialah pihak yang membutuhkan tetapi tidak mau mengemis dan kelompok ini yang lebih berhak mendapatkan zakat, sedangkan miskin adalah pihak yang membutuhkan pertolongan dan mengemis.

Islam memandang bahwa kemiskinan merupakan masalah struktural karena Allah telah menjamin rezeki setiap makhluk yang telah, sedang, dan akan diciptakan-Nya. Seperti dalam firmanNya:

اللَّهُ الَّذِي خَلَقَكُمْ ثُمَّ رَزَقَكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ هَلْ مِنْ شُرَكَائِكُمْ هَلْ مِنْ شُرَكَائِكُمْ مَنْ يَفْعَلُ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا سَبْحًا وَتَعْلَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ ٤٠

“Allah-lah yang menciptakan kamu, kemudian memberimu rezki, kemudian mematikanmu, kemudian menghidupkanmu (kembali). Adakah di antara yang kamu sekutukan dengan Allah itu yang dapat berbuat sesuatu dari yang demikian itu? Maha sucilah Dia dan Maha Tinggi dari apa yang mereka persekutukan”. (QS. Ar-Rum: 40)

﴿وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ ٦﴾

“Dan tidak ada suatu binatang melata pun di bumi melainkan Allah-lah yang memberi rezkinya, dan Dia mengetahui tempat berdiam binatang itu dan tempat



*penyimpanannya. Semuanya tertulis dalam kitab yang nyata (Lauh Mahfuzh)”. (QS. Hud: 6)*

Pada saat yang sama Islam telah menutup peluang bagi kemiskinan kultural dengan memberi kewajiban mencari nafkah bagi setiap individu, untuk memenuhi kebutuhannya. Seperti dalam Firman Allah

هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذُلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن رِّزْقِهِ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ ١٥

*“Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu, Maka berjalanlah di segala penjurunya dan makanlah sebahagian dari rezki-Nya. Dan hanya kepada-Nya-lah kamu (kembali setelah) dibangkitkan”. (QS. Al-Mulk: 15)*

Ayat tersebut menunjukkan bahwa Allah menciptakan bumi dan isinya untuk kesejahteraan manusia itu sendiri, agar manusia mampu memanfaatkan apa yang ada untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia.

Islam memandang bahwa masalah kemiskinan adalah masalah tidak terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan primer secara menyeluruh. Syariat Islam telah menentukan kebutuhan primer itu berupa tiga hal, yaitu sandang, pangan, dan papan. Allah SWT berfirman:

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا

*“Kewajiban ayah adalah memberikan makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang makruf, Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya”. (QS Al-Baqarah: 233)*

أَسْكِنُوهُنَّ مِن حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِّنْ وَجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ

*“Tempatkanlah mereka (para istri) di mana kamu bertempat tinggal, sesuai dengan kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka.” (QS Ath-Thalaaq: 6)*

Rasulullah SAW Bersabda “Ingatlah, bahwa hak mereka atas kalian adalah agar kalian berbuat baik kepada mereka dalam (memberikan) pakaian dan makanan” (HR Ibnu Majah).

Berdasarkan ayat dan hadis di atas dapat dipahami bahwa terdapat tiga aspek yang harus dipenuhi oleh manusia yaitu sandang, pangan, dan papan yang tergolong pada kebutuhan primer, apabila kebutuhan primer ini tidak terpenuhi maka dapat dikatakan bahwa ia seorang yang miskin atau kekurangan.

Kemiskinan identik terjadi di negara berkembang, menurut analisis Umar Chapra (dalam Inayati, 2013, hlm. 6) kemiskinan dan kesenjangan parah yang terjadi di negara-negara berkembang diakibatkan oleh kebijakan-kebijakan yang diambil menurut perspektif strategi sekuler, baik berupa kapitalisme, sosialisme, atau negara kesejahteraan. Sementara, strategi-strategi tersebut sudah gagal mewujudkan kebahagiaan bagi penganutnya. Sebab kebahagiaan adalah suatu refleksi dari kedamaian pikiran atau *an-nafs al-muthmainnah* yang dimaksudkan oleh al-Qur'an (Surat Al-Fajr: 27) dan hal tersebut tidaklah dapat dicapai kecuali kehidupan manusia selaras dengan dunia batinnya.

Menurut Umar Chapra (dalam Inayati, 2013, hal. 7) menawarkan tiga strategi solusi bagi permasalahan-permasalahan ekonomi yang dialami negara-negara muslim antara lain: 1) mekanisme filter terhadap kepentingan penggunaan sumber daya langka, sehingga tercipta efisiensi. 2) sistem motivasi penggunaan agar sesuai dengan mekanisme filter. 3) rekonstruksi sosio-ekonomi yang akan menegakkan kedua elemen sebelumnya dan mengaktualisasikan *hayatan thayyibatan*.

#### **2.1.1.4 Faktor Penyebab Kemiskinan**

Sharp et. al. (dalam Alliyah, 2013, hlm. 3) mengidentifikasi tiga penyebab utama kemiskinan yang dipandang dari segi ekonomi, yaitu:

- 1) Secara mikro, kemiskinan terjadi karena kepemilikan sumberdaya masyarakat yang berbeda sehingga menyebabkan timpangnya distribusi pendapatan. Masyarakat miskin hanya memiliki sumber daya yang terbatas dan kualitasnya rendah.
- 2) Kemiskinan terjadi akibat perbedaan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) masyarakat. Kualitas SDM rendah maka produktivitas juga rendah, produktivitas rendah maka upah atau pendapatan rendah. Rendahnya SDM

sebagai akibat dari tingkat pendidikan yang rendah, nasib yang kurang beruntung, adanya diskriminasi, atau keturunan dari keluarga miskin

- 3) Kemiskinan terjadi akibat kesempatan akses kepemilikan modal yang berbeda.

Menurut Yuli (2013, hlm. 105-107) dalam perspektif Islam, kemiskinan timbul karena berbagai sebab struktural yaitu:

1. Kemiskinan timbul karena kejahatan manusia terhadap alam (QS. Ar Ruum [30]:41) “Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar).” sehingga manusia itu sendiri yang kemudian merasakan dampaknya (QS Asy Syura [42]:30). “Dan apa musibah yang menimpa kamu maka adalah disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri, dan Allah memaafkan sebagian besar (dari kesalahan-kesalahanmu).”
2. Kemiskinan timbul karena ketidakpedulian dan kebakhilan kelompok kaya (QS Ali Imran [3]: 180) “Sekali-kali janganlah orang-orang yang bakhil dengan harta yang Allah berikan kepada mereka dari karuniaNya menyangka, bahwa kebakhilan itu baik bagi mereka. Sebenarnya kebakhilan itu adalah buruk bagi mereka. Harta yang mereka bakhilkan itu akan dikalungkan kelak di lehernya di hari kiamat. Dan kepunyaan Allah-lah segala warisan (yang ada) di langit dan di bumi. Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan” (QS Al Ma’aarij [70]:18) “Serta mengumpulkan (harta benda) lalu menyimpannya” sehingga si miskin tidak mampu keluar dari lingkaran kemiskinan.
3. Kemiskinan timbul karena sebagian manusia bersikap dzalim, eksploitatif, dan menindas kepada sebagian manusia yang lain, seperti memakan harta orang lain dengan jalan yang batil (QS At Taubah [9]:34) “Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya sebahagian besar dari orang-orang alim Yahudi dan rahib-rahib Nasrani benar-benar memakan harta orang dengan jalan yang batil dan mereka menghalang-halangi (manusia) dari jalan Allah. Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkanya pada

jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih”memakan harta anak yatim.

4. Kemiskinan timbul karena konsentrasi kekuatan politik, birokrasi, dan ekonomi di satu tangan. Hal ini tergambar dalam kisah Fir’aun, Haman, dan Qarun yang bersekutu dalam menindas rakyat Mesir di masa hidup Nabi Musa (QS Al Qashash [28]:1-88).
5. Kemiskinan timbul karena gejala eksternal seperti bencana alam atau peperangan sehingga negeri yang semula kaya berubah menjadi miskin. Bencana alam yang memiskinkan ini seperti yang menimpa kaum Saba (QS Saba’ [34]: 14-15) “Maka tatkala Kami telah menetapkan kematian Sulaiman, tidak ada yang menunjukkan kepada mereka kematiannya itu kecuali rayap yang memakan tongkatnya. Maka tatkala ia telah tersungkur, tahulah jin itu bahwa kalau sekiranya mereka mengetahui yang gaib tentulah mereka tidak tetap dalam siksa yang menghinakan. “Sesungguhnya bagi kaum Saba’ ada tanda (kekuasaan Tuhan) di tempat kediaman mereka yaitu dua buah kebun di sebelah kanan dan di sebelah kiri. (Kepada mereka dikatakan): “Makanlah olehmu dari rezeki yang (dianugerahkan) Tuhanmu dan bersyukurlah kamu kepada-Nya. (Negerimu) adalah negeri yang baik dan (Tuhanmu) adalah Tuhan Yang Maha Pengampun”.

Dengan memahami akar masalah, akan mampu memberikan titik terang untuk memahami fenomena kemiskinan yang semakin marak sehingga dapat dilakukan penanganan yang tepat. Untuk kasus di Indonesia sendiri menurut Wuri (2013, hlm. 5), akar kemiskinan yang terjadi antara lain perilaku eksploitatif baik terhadap keuangan negara maupun terhadap kekayaan alam yang dimiliki. Eksploitasi keuangan terjadi akibat peminjaman dana oleh pemerintah dengan penerapan bunga yang tinggi, sehingga setiap tahunnya negara harus menghabiskan sebagian besar anggaran untuk membayar bunga hutang dan sektor-sektor ekonomi pun *collapse* karena bunga tinggi yang diterapkan oleh perbankan. Selain itu, birokrasi yang korup dan pemusatan kekuasaan di tangan kekuatan politik dan pemilik modal juga menyebabkan terjadinya

pengesampingan kepentingan publik sehingga muncul ketidakjelasan antara kepentingan publik dan kepentingan pribadi.

#### **2.1.1.5 Cara Pengentasan Kemiskinan Perspektif Islam**

Islam memberikan berbagai macam cara untuk mengantisipasi kemiskinan. Jika dikaji lebih dalam lagi Islam memiliki berbagai prinsip-prinsip yang terkait dengan kebijakan publik dan dapat dijadikan panduan bagi program pengentasan kemiskinan dan sekaligus penciptaan lapangan kerja (Wuri, 2013, hlm. 5) sebagai berikut:

1. Islam mendorong pertumbuhan ekonomi yang dapat memberikan manfaat luas bagi masyarakat (*pro-poor growth*). Islam mencapai *pro-poor growth* melalui dua cara, yaitu pelarangan riba dan mendorong kegiatan sektor riil. Pelarangan riba secara efektif dapat mengendalikan inflasi sehingga daya beli masyarakat terjaga dan stabilitas perekonomian tercipta baik. Islam juga mengarahkan modal pada kegiatan ekonomi produktif melalui kerjasama ekonomi dan bisnis seperti *mudharabah*, *muzara'ah*, dan *musaqat*. Dengan demikian, tercipta keselarasan antara sektor riil dan moneter sehingga pertumbuhan ekonomi dapat berlangsung secara berkesinambungan.
2. Islam mendorong penciptaan anggaran negara yang memihak kepada kepentingan masyarakat banyak (*pro-poor budgeting*). Dalam sejarah Islam, terdapat tiga prinsip utama dalam mencapai *pro-poor budgeting*, yaitu disiplin fiskal yang ketat, tata kelola pemerintahan yang baik, dan penggunaan anggaran negara sepenuhnya untuk kepentingan publik atau efisiensi anggaran. Tidak pernah terjadi defisit anggaran dalam pemerintahan Islam walau tekanan untuk pengeluaran sangat tinggi, kecuali sekali pada masa pemerintahan Nabi Muhammad ketika perang, yang lebih banyak didorong adalah efisiensi dan penghematan anggaran melalui *good governance*. Dalam perspektif Islam, anggaran negara adalah harta publik sehingga anggaran akan sangat responsif terhadap kepentingan orang miskin, seperti menyediakan makanan, membayar biaya penguburan dan hutang, memberi pinjaman tanpa bunga untuk tujuan komersial, beasiswa, dan lain-lain. Islam pun menekankan bahwa jabatan dalam pemerintah merupakan amanah yang harus dijaga dan

dijalankan dalam posisinya sebagai wakil rakyat sehingga penekanan amanah rakyat menjadi sangat esensial untuk dijadikan dasar bahwa segala sesuatu, yaitu penetapan kebijakan, haruslah didasarkan pada kepentingan atau kebermanfaatannya masyarakat.

3. Islam mendorong pembangunan infrastruktur yang memberi manfaat luas bagi masyarakat (*pro-poor infrastructure*). Islam mendorong pembangunan infrastruktur yang memiliki dampak eksternalitas positif dalam rangka meningkatkan kapasitas dan efisiensi perekonomian. Nabi Muhammad SAW membagikan tanah di Madinah kepada masyarakat untuk membangun perumahan, mendirikan pemandian umum di sudut kota, membangun pasar, memperluas jaringan jalan, dan lain-lain. Khalifah Umar bin Khattab membangun Kota Kufah dan Basrah dengan memberi perhatian besar pada infrastruktur dan tata ruang kota. Beliau juga memerintahkan Gubernur Mesir, Amr bin Ash, untuk mempergunakan sepertiga penerimaan Mesir untuk pembangunan jembatan, kanal, dan jaringan air bersih. Dengan dilakukannya pembangunan infrastruktur ini maka kebutuhan masyarakat dapat diakomodasi dengan baik, sehingga kemampuan untuk memenuhi kebutuhannya pun meningkat.
4. Islam mendorong penyediaan pelayanan publik dasar yang berpihak pada masyarakat luas (*pro-poor public services*). Terdapat tiga bidang pelayanan publik yang mendapat perhatian Islam secara serius, yaitu birokrasi, pendidikan, dan kesehatan. Di dalam Islam, birokrasi adalah amanah untuk melayani publik, bukan untuk kepentingan diri sendiri atau golongan. Khalifah Usman tidak mengambil gaji dari kantornya dan Khalifah Ali membersihkan birokrasi dengan memecat pejabat-pejabat publik yang korup. Selain itu, Islam juga mendorong pembangunan pendidikan dan kesehatan sebagai sumber produktivitas untuk pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang. Nabi Muhammad SAW meminta tebusan bagi tawanan perang dengan mengajarkan baca tulis kepada masyarakat. Nabi Muhammad juga menyuruh masyarakat berperilaku hidup bersih agar senantiasa terhindar dari penyakit.

5. Islam mendorong kebijakan pemerataan dan distribusi pendapatan yang memihak masyarakat miskin (*pro-poor income distribution*). Terdapat tiga instrumen utama dalam Islam terkait distribusi pendapatan yaitu aturan kepemilikan tanah, penerapan zakat, serta menganjurkan qardul hasan, infak, dan wakaf. Islam mengatur bagi setiap orang yang menghidupkan tanah mati, maka tanah itu menjadi miliknya dan bagi siapa saja yang menelantarkan tanahnya, maka negara berhak mengambilnya untuk kemudian memberikan kepada orang lain yang siap mengolahnya. Dengan penerapan zakat, maka tidak akan ada konsentrasi harta pada sekelompok masyarakat. Zakat juga memastikan bahwa setiap orang akan mendapat jaminan hidup minimum sehingga memiliki peluang untuk keluar dari kemiskinan. Lebih jauh lagi, untuk memastikan bahwa harta tidak hanya beredar dikalangan orang kaya saja, Islam juga sangat mendorong orang kaya untuk memberikan qard, infak, dan wakaf.

Bukan tidak mungkin kemiskinan hilang dari peradaban ketika usaha dan upaya untuk memberantasnya masih tetap dipegang teguh. “...*Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum sebelum mereka mengubah nasib mereka sendiri...*” (Q.S.13:11). Demikianlah Islam mendorong pengentasan kemiskinan melalui beberapa hal, yaitu pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, pengembangan sektor riil, dan pemerataan pembangunan. Dan sesungguhnya masih banyak lagi konsep dalam Islam yang sangat dapat diterapkan.

### **2.1.2 Teori Pembangunan Ibnu Khaldun**

Ibnu Khaldun membangun sebuah model yang dapat menjelaskan maju dan mundurnya peradaban atau pembangunan dan kemunduran ekonomi, keduanya merupakan sebuah fenomena yang memiliki hubungan saling ketergantungan di dalam modelnya. Model yang dibangun Ibnu Khaldun memberikan jawaban beberapa pertanyaan krusial yang harus dijawab oleh ekonomi pembangunan mengenai mengapa banyak negara muslim yang mengalami kemajuan dengan cepat dan terus berkembang selama beberapa abad, dan mengapa kemudian sesudah itu mengalami kemunduran, bahkan sampai mengalami kolonialisasi dan sampai saat ini tidak dapat merespon tantangan yang dihadapinya.

Ibnu Khaldun mencoba menjelaskan secara ilmiah prinsip-prinsip yang mengatur jatuh banggunya suatu dinasti, negara, atau peradaban di dalam bukunya yang berjudul *Muqaddimah*. Prinsip-prinsip ini mencerminkan sunatullah dan hanya sebagian saja yang diidentifikasi dalam Al-Quran, sehingga perlu dielaborasi lebih jauh lagi oleh seorang ahli sejarah.

*Muqaddimah* yang diselesaikan pada November 1377 adalah buah karya dari cita-cita besarnya tersebut. *Muqaddimah* secara harfiah berarti 'pembukaan' atau 'introduksi' dan merupakan jilid pembuka dari tujuh jilid tulisan sejarah yang secara bebas diterjemahkan ke dalam buku "*The Book of Lessons and the Record of Cause and Effect in the History of Arabs, Persians and Berbers and Their Powerful Contemporaries*." *Muqaddimah* mencoba untuk menjelaskan prinsip-prinsip yang menentukan kebangkitan dan keruntuhan dinasti yang berkuasa (*daulah*) dan peradaban (*'umran*). Tetapi bukan hanya itu saja yang dibahas, *Muqaddimah* juga berisi diskusi ekonomi, sosiologi dan ilmu politik, yang merupakan kontribusi asli karya Ibnu Khaldun untuk cabang-cabang ilmu tersebut. Wawasan Ibnu Khaldun terhadap beberapa prinsip-prinsip ekonomi sangat dalam dan jauh ke depan sehingga sejumlah teori yang dikemukakannya hampir enam abad yang lalu sampai sekarang tidak diragukan merupakan perintis dari beberapa formula teori modern.

### 2.1.2.1 Model Dinamika Interdisiplin

Keseluruhan model Ibnu Khaldun (dalam Chapra, 2006, hlm. 839) dapat disarikan dalam nasihatnya yang diberikannya kepada kekhalifahan sebagai berikut:

1. *Kekuatan kedaulatan (al-mulk) tidak akan terwujud kecuali dengan implementasi syariah;*
2. *Syariah tidak dapat diimplementasikan kecuali oleh sebuah kedaulatan (al-mulk);*
3. *Kedaulatan tidak akan memperoleh kekuatan kecuali bila didukung oleh sumber daya manusia (ar-rijal);*
4. *Sumber daya manusia tidak dapat diipertahankan kecuali dengan harta benda (al-mal);*



5. *Harta benda tidak dapat diperoleh kecuali dengan pembangunan (al-imarah);*
6. *Pembangunan tidak dapat dicapai kecuali dengan keadilan (al-adl);*
7. *Keadilan merupakan tolak ukur (al-mizan) yang dipakai Allah untuk mengevaluasi manusia; dan*
8. *Kedaulatan mengandung muatan tanggung jawab untuk menegakkan keadilan.”*

Kalimat nasihat ini terdiri dari delapan prinsip dari kebijakan politik Ibnu Khaldun. Ke delapan kalimat ini disebut “*eight wise principles*” atau kalimat *hikamiyah*. Masing-masing faktor berhubungan satu sama lain secara sama dalam sebuah alur daur dimana permulaan dan akhir tidak dapat dibedakan.

Kalimat *hikamiyah* ini mencerminkan karakter dinamika dan lintas disiplin dari analisa Ibnu Khaldun. Lintas disiplin karena tidak merujuk penyebab kemunduran peradaban pada satu faktor saja, melainkan menghubungkan semua variabel penting politik dan sosio-ekonomi seperti syariah (S), otoritas politik (G), masyarakat (N), kekayaan (W), pembangunan (g) dan keadilan (j), dalam sebuah daur perputaran *interdependen*, masing-masing faktor saling mempengaruhi dan pada saat yang sama juga menerima pengaruh dari faktor-faktor tersebut.

Operasi daur ini terjadi dalam sebuah reaksi berantai dalam suatu periode yang panjang setidaknya tiga generasi atau sekitar 120 tahun, maka dimensi dinamisme dapat memperlihatkan bagaimana faktor-faktor moral, psikologi, politik, sosial, ekonomi, dan demografi berinteraksi satu sama lain sepanjang waktu dan membawa kepada kemajuan atau kemunduran suatu peradaban.

Dalam suatu analisa jangka panjang seperti ini, tidak berlaku klausa “*ceteris paribus*” karena tidak ada variabel yang konstan. Salah satu variabel bertindak sebagai mekanisme pemicu, variabel lain mungkin bereaksi searah pemicunya, tetapi mungkin juga tidak bereaksi. Jika variabel lain tidak bereaksi pada arah yang sama dengan pemicu, maka kerusakan di satu sektor mungkin tidak akan menyebar ke sektor lain sehingga sektor yang rusak akan tereformasi sejalan dengan waktu, dengan kata lain kemunduran suatu peradaban bisa lebih diperlambat. Tetapi jika sektor yang bereaksi searah dengan pemicunya, maka

keseluruhan akan mendapat momentum melalui suatu reaksi berantai yang saling berhubungan sedemikian rupa sehingga sulit mengidentifikasi sebab dari akibat Daur sebab akibat ini dinamakan daur keadilan (*Circle of Equity*).

#### 2.1.2.2 Peran Pembangunan (g)

Pembangunan sangat penting karena kecenderungan alamiah dalam masyarakat selalu berkembang, tidak diam dan stagnan, perkembangan tersebut dapat berupa kemajuan atau justru kemunduran. Pembangunan dalam model Ibnu Khaldun tidak mengacu hanya kepada pertumbuhan ekonomi saja tetapi meliputi semua aspek pembangunan manusia sehingga masing-masing variabel mempengaruhi variabel lain (G, S, N, W, j dan g) akhirnya akan memberikan kontribusi kepada kesejahteraan manusia dan tidak hanya menjamin kelangsungan hidup saja melainkan kemajuan dalam peradaban. Seperti halnya yang dikemukakan oleh Muhajiji (2010, hlm. 22) pembangunan merupakan usaha untuk menciptakan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat yang mencakup berbagai aspek kehidupan secara berkesinambungan yang hasilnya harus bisa dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat secara adil dan merata.

Todaro dan Smith (2006, hlm. 321) menyatakan nilai inti pembangunan adalah kecukupan (*sustenance*), harga diri (*self esteem*) dan kebebasan (*freedom*). Kecukupan (*sustenance*) adalah kemampuan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar seperti sandang, pangan, papan, kesehatan dan keamanan. Harga diri (*self esteem*) untuk menjadi manusia seutuhnya, merupakan dorongan dari diri sendiri untuk maju, menghargai diri sendiri, merasa diri pantas dan layak melakukan sesuatu. Sedangkan kebebasan (*freedom*) dari sikap menghamba berupa kemampuan untuk memilih. Nilai yang terkandung dalam konsep ini adalah konsep kemerdekaan manusia dapat diartikan sebagai kemampuan untuk berdiri tegak sehingga tidak mudah diperbudak oleh pengejaran aspek-aspek materiil dalam kehidupan ini. Sedangkan tujuan inti pembangunan menurut Todaro dan Smith (2006) ada tiga, yaitu:

1. Peningkatan ketersediaan serta perluasan distribusi berbagai barang kebutuhan hidup
2. Peningkatan standar hidup

### 3. Perluasan pilihan-pilihan ekonomis dan sosial

Bank Dunia 1991, (dalam Todaro dan Smith, 2006, hlm. 330) menyatakan bahwa tujuan utama pembangunan adalah memperbaiki kualitas kehidupan. Sedangkan United Nations Development Programme (UNDP) tahun 1991 menyatakan bahwa cara terbaik untuk mewujudkan pembangunan manusia adalah dengan meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang lebih merata dan melalui pembangunan partisipatif.

#### 2.1.2.2 Peran Sumber Daya Insani atau Masyarakat (N)

Manusia merupakan pusat analisis Ibnu Khaldun karena maju dan mundurnya suatu peradaban sangat berhubungan dengan kesejahteraan atau kesengsaraan masyarakat. Kesejahteraan dan kesengsaraan masyarakat tidak hanya bergantung pada variabel-variabel ekonomi saja, melainkan juga pada sejumlah faktor lain yang turut menentukan kualitas individu, masyarakat, penguasa, dan lembaga-lembaga melalui sebuah proses sebab akibat selama periode yang panjang.

Manusia memiliki kedudukan yang mulia dan makhluk yang sempurna diantara makhluk-makhluk lain ciptaan Allah. Bahkan, Allah sendiri telah mengangkat manusia sebagai khalifah dimuka bumi. Manusia adalah Khalifah Allah di muka bumi, sesuai dengan firman Allah SWT dalam Surat Al-Baqarah Ayat 30 yang berbunyi:

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ ۝ ۳۰

*"Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada Para Malaikat: "Sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi." mereka berkata: "Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, Padahal Kami Senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau?" Tuhan berfirman: "Sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui." (QS. Al-Baqarah: 30)*

Hal ini lah yang menjadi alasan mengapa para utusan Allah ditujukan untuk memperbaiki akhlaq manusia. Manusia berusaha keras untuk memperoleh pendidikan dan kehidupan sosial-ekonomi agar dapat memperoleh nasib yang baik. Sebab Allah berfirman:

وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ لَمْ يَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ ١١

*“Sesungguhnya Allah tidak merobah Keadaan sesuatu kaum sehingga mereka merobah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap sesuatu kaum, Maka tak ada yang dapat menolaknya; dan sekali-kali tak ada pelindung bagi mereka selain Dia”.* (QS. Ar-Raad: 11)

Manusia memiliki peranan yang penting dalam proses maju dan mundurnya suatu peradaban termasuk pembangunan ekonomi. Manusia adalah tujuan dan alat pembangunan. Manusia merupakan tujuan pembangunan karena kesejahteraan (*falah*) ditujukan bagi manusia, ketika kesejahteraan telah terpenuhi maka manusia akan dapat bekerja dengan efektif dan kreatif, sehingga tidak salah jika manusia ditunjuk sebagai khalifah bumi karena merupakan alat pembangunan namun pembangunan tersebut akan terjadi ketika manusia mau bekerja dan membangun. Besar kecilnya potensi pertumbuhan ekonomi suatu negara akan sangat dipengaruhi oleh kualitas maupun kuantitas sumber daya manusianya. Kualitas sumber daya insani tersebut dapat dilihat dari indeks pembangunan manusia (IPM) atau dikenal dengan *Human Development Index* (HDI) yang dikeluarkan oleh United Nations Development Programme (UNDP).

Indeks yang dikeluarkan terakhir oleh UNDP posisi Indonesia berada 107 dari 177 negara di dunia. Kondisi ini menempatkan Indonesia berada pada kisaran negara-negara sedang berkembang dengan tingkat pembangunan manusia level menengah, padahal pembangunan manusia merupakan salah satu indikator bagi kemajuan suatu negara. Suatu negara dikatakan maju bukan hanya dihitung dari pendapatan domestik bruto saja tetapi mencakup aspek harapan hidup serta pendidikan masyarakatnya. Dengan demikian, pembangunan sumber daya insani haruslah mendapatkan perhatian. Menurut hasil penelitian Mulyaningsih (2008,

hlm. 115), tentang pengaruh pembangunan manusia terbukti secara signifikan berpengaruh terhadap kemiskinan.

### **2.1.2.3 Peran Kekayaan (W)**

Kekayaan menyediakan sumber daya yang diperlukan untuk menjamin keadilan (j) dan pembangunan (g). Kekayaan bergantung pada aktivitas ekonomi, luasnya pasar, insentif dan fasilitas yang disediakan oleh negara yang gilirannya bergantung pada tabungan atau kelebihan sesudah pemenuhan kebutuhan oleh masyarakat. Semakin besar pendapatan akan memberikan kontribusi yang semakin besar pula pada tabungan dan semakin besar investasi pada peralatan dan gilirannya akan memberikan kontribusi yang lebih besar kepada pembangunan (g) dan kekayaan (W).

Ibnu khaldun menekankan peran investasi lebih jauh mengatakan bahwa kekayaan tidak tumbuh manakala ditimbun dan disimpan. Ia akan tumbuh dan berkembang manakala dibelanjakan untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat, untuk diberikan kepada yang berhak dan menghapuskan kesulitan. Faktor-faktor yang menjadi katalisator adalah laju pajak yang rendah, keamanan kehidupan, hak milik dan lingkungan fisik yang sehat.

Kekayaan juga bergantung pada pembagian kerja dan spesialisasi. Semakin besar pembagian kerja dan spesialisasi semakin tinggi kekayaan, namun pembagian kerja ini tidak dapat direalisasikan sehingga terdapat pasar yang diregulasi dengan baik yang memungkinkan semua orang memenuhi kebutuhan mereka. Peningkatan dalam pendapatan akan memberikan kontribusi kepada peningkatan dalam penerimaan pajak dan memungkinkan pemerintah membelanjakan lebih besar kepada kesejahteraan rakyat. Hal ini akan memberikan peluang-peluang ekonomi dan pembangunan akan semakin berkembang, sehingga akan mendorong pertumbuhan penduduk, migrasi tenaga kerja terampil maupun tidak terampil dan kaum terpelajar ke tempat-tempat lain sehingga akan memperkuat modal intelektual dan SDM masyarakat.

Pertumbuhan jumlah penduduk akan mendorong permintaan terhadap barang dan jasa, pada gilirannya akan mendorong industri, meningkatkan penghasilan, mendorong perkembangan sains dan pendidikan untuk mempercepat

pembangunan. Meskipun peningkatan jumlah penduduk dan pembangunan menimbulkan kemakmuran hal ini juga akan menyebabkan polusi udara dan lingkungan fisik. Pembangunan dan kemakmuran juga akan mendorong kemewahan, dan pada gilirannya akan merusak moral. Hasil-hasil pembangunan tidak dapat didistribusikan secara merata, keadaan ini akan menghapus insentif untuk bekerja dan kreativitas serta akan menurunkan tingkat kemakmuran.

Penurunan pendapatan akan menimbulkan kemerosotan dalam penerimaan pajak, dan tidak dapat lagi mencukupi belanja pemerintah. Negara akan cenderung memaksakan pajak yang lebih tinggi dan juga akan mencoba mendapatkan kontrol yang lebih besar terhadap semua sumber kekayaan. Ketika pendapatan merosot, penerimaan pajak pun merosot maka negara tidak akan mampu berbelanja untuk usaha-usaha pembangunan dan kesejahteraan. Pembangunan akan merosot semakin dalam, kekuatan-kekuatan yang menghancurkan semakin bergerak cepat, dan pada akhirnya meruntuhkan dinasti yang berkuasa.

#### **2.1.2.4 Peran Negara (G)**

Islam memandang bahwa keterlibatan pemerintah dalam perekonomian cukup besar, hal ini dapat diketahui dari sejarah pemerintahan Rasulullah dan juga khalifah, pada masa itu pemerintah terlibat dalam semua ruang lingkup kehidupan termasuk ekonomi. Ibnu Khaldun telah membedakan antara masyarakat dan negara. Ia berpendapat bahwa berhubung dengan tabiat dan fitrah kejadiannya, manusia itu memerlukan masyarakat, artinya bahwa manusia itu memerlukan kerjasama antara sesamanya untuk dapat hidup. Walaupun terdapat perbedaan antara negara dengan masyarakat, namun antara keduanya tidak dapat dipisahkan.

Negara dihubungkan dengan pemegang kekuasaan, yang menurut Ibnu Khaldun kekuasaan dan politik memiliki tujuan substansial yang seharusnya diformulasikan untuk kemanusiaan karena keduanya secara naluri terkait dengan fitrah manusia dan pola pikirnya yang condong kepada maslahat. Kemudian dalam negara memiliki kekuatan penggerak dalam hal ini disebut *Ashabiyah* atau pemerintahan. *Ashabiyah* mempunyai peran yang besar dalam pembangunan, apabila *ashabiyah* itu kuat maka negara yang muncul akan luas atau maju dan

sebaliknya apabila *ashabiyah* itu lemah, maka negara tersebut relatif sempit atau tertinggal.

Menurut pandangan Ibnu Taimiyah negara berkewajiban menanggulangi kemiskinan. Ibnu Taimiyah (dalam Hanafiah, 2008, hlm. 26) menyatakan:

Kemiskinan merupakan kewajiban pemegang otoritas (imam) untuk mengumpulkan uang dari sumber manapun yang menjadi haknya (negara) dan membelanjakannya secara adil dan layak dilaksanakan dan tak pernah meniadakan hak dari mereka-mereka yang memang berhak. Sungguh merupakan perbuatan terbaik bagi pemegang otoritas untuk membedakan antara mereka yang patut menerima bantuan dan yang tak patut dan berlaku adil dalam mendistribusikan untuk tujuan kehidupan maupun urusan publik.

Berdasarkan ungkapan tersebut, cara menanggulangi kemiskinan dapat dimulai dari adanya peran pemegang otoritas (imam) yang mampu mengumpulkan, mendistribusikan harta kepada yang orang-orang yang berhak dengan kata lain miskin. Hal tersebut dilakukan untuk kepentingan masyarakat umumnya.

Untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat pemerintah memiliki tugas menghapuskan kesulitan ekonomi yang dialami rakyat, memberi kemudahan pada akses pengembangan ekonomi kepada seluruh lapisan rakyat dan menciptakan kemakmuran pada masyarakat. Berbagai macam program telah dilakukan pemerintah sebagai upaya untuk mengurangi tingkat kemiskinan seperti Program Jaringan Pengaman Sosial (JPS) dan Operasi Pasar Khusus (OPK), Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) sebagai kompensasi atas kenaikan BBM, Program Pengembangan Kecamatan (PPK), Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2KP), serta beras untuk masyarakat miskin (RASKIN).

Terdapat beberapa hal penting yang perlu diperhatikan pemerintah dalam pengentasan kemiskinan di Indonesia, seperti halnya yang dikemukakan oleh Misdawita (2013, hlm. 148) antara lain yaitu pengeluaran pemerintah di sektor pendidikan, kesehatan, pengeluaran subsidi, perilaku rumah tangga, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), serta aspek penting lainnya yang berperan untuk pengurangan angka kemiskinan. Dari beberapa aspek yang ada sudah disebutkan, aspek pengeluaran adalah aspek yang krusial bagi pemerintah, sebab besaran dari pengeluaran ditetapkan secara langsung oleh pemerintah dan pada akhirnya dapat

mempengaruhi angka kemiskinan. Dari penelitian yang dilakukan tersebut terbukti bahwa pengeluaran pemerintah dibidang pendidikan dan kesehatan berpengaruh secara signifikan terhadap tingkat kemiskinan.

## 2.2 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu yang penulis jadikan rujukan dalam penelitian ini terdiri dari berbagai penelitian dengan fokus tema yang relevan dengan penelitian ini yaitu kemiskinan. Beberapa penelitian terdahulu tersebut yaitu:

**Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu**

Penulis	Tahun	Judul	Model	Hasil Penelitian
Umar Chapra The Journal of Socio- Economics 37	2006	<i>Ibn Khaldun's theory of development: Does it help explain the low performance of the present-day Muslim world?</i>	$G = f(S, N, W, j \text{ dan } g)$	Pertumbuhan atau penurunan perekonomian suatu masyarakat tidak tergantung pada satu faktor, tetapi terdapat interaksi dari faktor moral, sosial, ekonomi, politik dan sejarah selama jangka waktu yang panjang.
Omy Hanafiah Thesis, Universitas Indonesia	2008	Pengaruh Variabel- Variabel Dalam Model Dinamika Ibnu Khaldun Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Beberapa Negara Muslim	Kekayaan (X1), pembangunan dan keadilan (X2), Negara (X3), Manusia (X4), Syariah (X5).	Variabel-variabel model dinamika Ibnu Khaldun berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan di Negara-negara muslim. Dimana Negara (G), Masyarakat (N), kekayaan (W), berpengaruh secara negatif, sedangkan variabel pembangunan (g) dan keadilan (j) mempunyai pengaruh secara positif. Namun variabel syariah (S) tidak berpengaruh terhadap



					tingkat kemiskinan di Negara-negara muslim.
Dian Putra dan Indra Jurnal Ilmu Ekonomi Volume 5 (1), P-ISSN: 2087-2046; E-ISSN: 2476-9223	2016	<i>Determinant Of The Poverty In The Moslem Countries: Ibn Khaldun Development Model</i>	Kekayaan Negara (X1), Pengeluaran Pemerintah (X2), Sumber Daya Manusia (X3), Syariah (X4), Pembangunan Keadilan (X5), (X6).	Hasil penelitian ini GDP per kapita berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan di Negara OKI. Dan juga ditemukan bahwa pengangguran (sebagai variabel control) berperan dalam memicu kemiskinan di Negara OKI. Sementara itu, pengeluaran peberintah dibidang pendidikan, Gini rasio, Indeks pembangunan manusia, dan indeks korupsi tidak signifikan terhadap kemiskinan.	
Akhmad Affandi dan Dewi Puji Astuti Journal of Humanomics Vol. 29, No. 2 Emerald Group Publishing 0828-8666, DOI 10.1108/08288661311319193	2013	<i>Dynamic Model of Ibn Khaldun Theory on Poverty (Empirical Analysis on the Poverty in Majority and Minority Muslim Population after the Financial Crisis)</i>	Kekayaan Negara (X1), Pengeluaran Pemerintah (X2), Sumber Daya Manusia (X3), Syariah (X4), Pembangunan Keadilan (X5), (X6).	Variabel model dinamika Ibnu Khaldun berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia sebagai Negara mayoritas muslim. Dimana di Pakistan hanya vaiabel IPM yang berpengaruh signifikan signifikan. Dimana di India, variabel model dinamika Ibnu Khaldun variaber tersebut bervariasi..	
Yani Mulyaningsih	2008	Pengaruh Pengeluaran Pemerintah di Sektor	Pengeluaran Pemerintah	- Pengeluaran pemerintah tidak berpengaruh terhadap	

Thesis, Universitas Indonesia		Publik Pembangunan Manusia Kemiskinan	Terhadap dan	(X1)	peningkatan pembangunan manusia - Pengeluaran publik tidak berpengaruh terhadap kemiskinan - Pembangunan manusia terbukti secara signifikan berpengaruh terhadap kemiskinan
Misdawita dan A. Arini Putri Sari Jurnal Ekonomi & Kebijakan Publik, Vol. 4 No. 2	2013	Analisis Pengeluaran Pemerintah di Pendidikan, Kesehatan, Pengeluaran terhadap di Indonesia	Dampak di Bidang dan Subsidi Kemiskinan	Pengeluaran pemerintah di bidang pendidikan (X1) Pengeluaran pemerintah di bidang kesehatan (X2) dan Pengeluaran pemerintah dalam pemberian subsidi (X3)	- Pengeluaran pemerintah di bidang pendidikan memiliki dampak yang negatif dan signifikan terhadap angka kemiskinan - Pengeluaran pemerintah di bidang kesehatan memiliki dampak yang positif dan signifikan terhadap angka kemiskinan - Pengeluaran pemerintah untuk subsidi memiliki dampak yang negatif namun tidak signifikan
Kadek Novita dan Arshanti I. G. A. P. Wirathi Jurnal Ekonomi Pembangunan Vol. 4, No. 5 ISSN: 2303-	2015	Pengaruh Terhadap Kemiskinan Mediasi Ekonomi Provinsi Bali	Investasi Pengentasan Melalui Pertumbuhan Provinsi Bali	Investasi (X1) dan Pertumbuhan ekonomi (X2).	- Investasi berpengaruh negatif signifikan terhadap kemiskinan Provinsi Bali. - Secara langsung variabel investasi berpengaruh positif signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Provinsi Bali.

0178						<p>- Secara langsung variabel pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif signifikan terhadap kemiskinan Provinsi Bali.</p> <p>- Dan secara tidak langsung investasi berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan Provinsi Bali melalui pertumbuhan ekonomi.</p>
Adi Widodo, Waridin, dan Johanna Maria K.	2011	Analisis Pengeluaran Pemerintah di Sektor Pendidikan dan Kesehatan Terhadap Pengentasan Kemiskinan melalui Peningkatan Pembangunan Manusia di Provinsi Jawa Tengah	Pengaruh Sektor (X1) dan Terhadap	Investasi sektor publik (X1)	Alokasi pemerintah tidak secara langsung mempengaruhi IPM ataupun kemiskinan, namun secara bersama-sama (simultan) pengeluaran sektor publik dan IPM dapat mempengaruhi kemiskinan.	
Aloysius Gunadi Brata Lembaga Penelitian, Universitas Atma Jaya Yogyakarta	2005	Investasi Publik Pembangunan Manusia, Kemiskinan	Sektor Lokal, dan	Investasi Sektor Publik Lokal (X1), Pembangunan Manusia (X2), dan Kemiskinan	Pembangunan sosial memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat pembangunan manusia. Pengeluaran social juga memberikan manfaat bagi pengurangan tingkat kemiskinan. Namun demikian pengaruh dari sumber daya manusia	

---

					terhadap tingkat kemiskinan tampak lebih besar daripada pengaruh pengeluaran sosial.
Bruno Ocaya, Charles Ruranga, dan William Kaberuka	2012	<i>Dynamic Relationship between Gross Domestic Product and Domestic Investment in Rwanda</i>	Produk Domestik Bruto (X1) dan Investasi Domestik (X2).	Dengan menggunakan tes <i>The Augmented Dickey-Fuller (ADF)</i> tes <i>Phillips-Perron</i> menunjukkan bahwa GDP dan DI pada tingkatannya tidak berubah, tetapi perbedaan pertama mereka stasioner, yang berarti keduanya Sali terintegrasi satu sama lainnya.	
World Journal of Education	Vol. 2, No. 6; 2012				
	ISSN 1925-0746, E-ISSN 1925-0754				

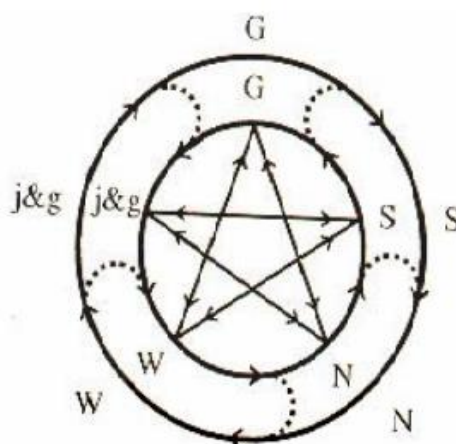
---

### 2.3 Kerangka Pemikiran

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Omy Firliany Hanafiah (2008). Penelitian tersebut bertujuan untuk mengetahui lebih lanjut bagaimana pengaruh variabel-variabel model dinamika Ibnu Khaldun terhadap tingkat kemiskinan di beberapa negara muslim yang merupakan studi kasus di 15 negara muslim pada tahun 2000-2004. Negara muslim tersebut adalah negara yang tergabung dalam Organisasi Konferensi Islam (OKI).

Berdasarkan penelitian Hanafiah (2008, hlm. 10) manusia menjadi pusat analisis dalam model Ibnu Khaldun karena kesejahteraan atau kesengsaraan rakyat merupakan faktor yang berkaitan erat dengan kejayaan dan keruntuhan sebuah negara. Kesejahteraan manusia menentukan kejayaan atau kemunduran suatu negara. Salah satu indikator kesejahteraan adalah kemiskinan, maka penelitian tersebut menggunakan variabel-variabel dalam model dinamika Ibnu Khaldun sebagai variabel-variabel yang dapat mempengaruhi tingkat kemiskinan di negara-negara muslim.

Model dinamika Ibnu Khaldun ini merupakan model yang dinamis dimana prinsip yang satu terkait dengan prinsip yang lain sehingga awal dan akhir lingkaran ini tidak dapat dibedakan. Menurut Ibnu Khaldun, pembangunan merupakan proses multidimensi yang tidak hanya melibatkan faktor ekonomi saja, melainkan pada semua variabel penting politik dan sosio-ekonomi seperti syariah (S), otoritas politik (G), manusia (N), harta benda atau kekayaan (W), pembangunan (g) dan keadilan (j). Model dinamika Ibnu Khaldun tersebut berbentuk lingkaran seperti gambar dibawah ini.



**Gambar 2. 1 Model Dinamika Ibnu Khaldun**

*Sumber: Umar Chapra, 2006, hlm. 840*

Berdasarkan Gambar 2.1, dapat dilihat bahwa pembangunan tidak hanya membutuhkan pertumbuhan ekonomi, tetapi harus diiringi juga dengan keadilan dalam distribusi kekayaan, pembangunan sumber daya manusia, peran pemerintah, dan implementasi syariah maka akan terwujud pembangunan yang berkeadilan sehingga pemenuhan kebutuhan, kesempatan kerja penuh, distribusi pendapatan dan kekayaan yang merata dapat tercapai.

Menurut Affandi dan Astuti (2013, hlm 146) dan Hanafiah (2008, hlm. 40), berikut ini adalah variabel model dinamika Ibnu Khaldun yang dapat di tetapkan dalam persamaan fungsi sebagai berikut:

$$P = f(W, N, G, g \text{ dan } j, S) \quad (1.1)$$

Keterangan:

P = Tingkat Kemiskinan

W = Kekayaan Negara

N	= Sumber Daya Insani atau Masyarakat
G	= Pemerintah
g	= Pembangunan
j	= Keadilan
S	= Syariah

Agar model dinamika Ibnu Khaldun ini dapat digunakan, maka Hanafiah (2008, hlm. 41) membentuk variabel manifestasinya untuk setiap variabel tersebut, sehingga model tersebut menjadi:

$$Miskin = f(In\ Inves, HDI, Health, Educ, InGDPkap, Gini, Kons) \quad (1.2)$$

Keterangan:

Miskin	= Jumlah penduduk miskin
InInves	= Total Investasi Negara
HDI	= Human Development Index/Indeks Pembangunan Manusia
<i>Health</i>	= pengeluaran pemerintah di sektor kesehatan
<i>Educ</i>	= pengeluaran pemerintah di sektor pendidikan
InGDPkap	= GDP per kapita
Gini	= Gini Rasio
Kons	= Konstitusi Negara

Berikut ini merupakan penjelasan dari fungsi tersebut:

- Untuk mengukur tingkat kemiskinan digunakan *national poverty line* yang diperoleh dari *Human Development Report* dan dikeluarkan oleh UNDP.
- Untuk mengukur pembangunan sumber daya insani atau masyarakat (N) digunakan HDI (*Human Development Index*) yang diperoleh dari *Human Development Report* yang dikeluarkan oleh UNDP.
- Untuk mengukur kebijakan pemerintah (G) dalam mengatasi kemiskinan digunakan pengeluaran pemerintah di sektor publik dan dalam penelitian tersebut yang digunakan adalah sektor pendidikan dan sektor kesehatan. Data diperoleh dari *Human Development Report* yang dikeluarkan oleh UNDP.
- Untuk mengukur kekayaan (W) negara digunakan data GDP perkapita berdasarkan PPP (*purchasing power parity*). Data diperoleh dari *Human Development Report* yang dikeluarkan oleh UNDP.

- e. Untuk mengukur pembangunan (g) dan keadilan (j) digunakan nilai pertumbuhan GDP per tahun dan Indeks Gini. Data diperoleh dari *Human Development Report* yang dikeluarkan oleh UNDP dan *World Bank*.
- f. Untuk mengukur dijalankan atau tidaknya syariat Islam (S) dilihat dari konstitusi negara, berdasarkan syariat Islam atau tidak, sehingga variabel ini berbentuk dummy.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian Hanafiah (2008, hlm. 44) adalah regresi data panel. Untuk menganalisis data panel tersebut menggunakan metode *pooled least square*, model efek tetap dan metode efek random. Setelah dianalisis dengan semua metode tersebut, selanjutnya dilakukan pengujian untuk memilih metode terbaik dengan menggunakan berbagai pengujian yaitu uji Chow, Hausman dan uji LM. Kesimpulan dari hasil penelitian Omy Firlianti adalah sebagai berikut:

1. Total investasi yang merupakan proxy dari Kekayaan (W), secara statistik signifikan pada  $\alpha = 5 \%$ , yang berarti total investasi merupakan faktor yang mempengaruhi tingkat kemiskinan di negara muslim. Koefisien slope yang diperoleh bertanda negatif artinya negara yang lebih rendah tingkat pendapatannya akan cenderung memiliki tingkat kemiskinan yang lebih tinggi.
2. Distribusi pendapatan yang tidak merata (j) akan meningkatkan kemiskinan, ini dapat dilihat dari koefisien slope yang bertanda negatif yang menunjukkan bahwa negara yang lebih tinggi gini rasionya akan cenderung memiliki tingkat kemiskinan yang lebih tinggi.
3. Peningkatan pendapatan perkapita (g), berpengaruh positif terhadap tingkat kemiskinan di negara-negara muslim.
4. Pengeluaran pemerintah di bidang pendidikan dan kesehatan yang merupakan proxy dari Pemerintah (G), secara statistik signifikan pada  $\alpha = 5 \%$ , yang berarti pengeluaran pemerintah di bidang pendidikan dan kesehatan merupakan faktor yang mempengaruhi tingkat kemiskinan di negara muslim. Koefisien slope yang diperoleh bertanda negatif artinya negara yang lebih rendah pengeluaran pemerintah di bidang pendidikan akan cenderung memiliki tingkat kemiskinan yang lebih tinggi.

5. Nilai indeks pembangunan manusia (N) yang tinggi akan mengurangi tingkat kemiskinan. Koefisien slope yang diperoleh bertanda negatif yang berarti bahwa negara yang memiliki angka HDI lebih tinggi akan cenderung memiliki tingkat kemiskinan yang lebih rendah.
6. Konstitusi negara yang merupakan proxy dari syariah (S), tidak signifikan secara statistik pada  $\alpha = 5\%$ , ini berarti konstitusi negara bukan merupakan faktor yang mempengaruhi tingkat kemiskinan di Negara muslim.

Alasan peneliti mereplikasi penelitian tersebut karena ingin mengetahui bagaimana pengaruh model dinamika Ibnu Khaldun terhadap kemiskinan di Negara Indonesia, Brunei Darussalam dan Malaysia. Kemiskinan merupakan masalah serius yang telah dialami oleh negara sejak dahulu dan perlu ditangani dengan tepat sebab kegagalan dalam mengatasi kemiskinan akan menyebabkan *multiplier effect* munculnya berbagai permasalahan ekonomi, sosial dan politik di masyarakat. Kemiskinan merupakan fenomena multidimensi artinya kemiskinan dipengaruhi oleh banyak faktor tidak hanya faktor ekonomi saja, seperti halnya yang diungkapkan oleh Ibnu Khaldun, menurutnya pembangunan merupakan proses multi dimensi yang tidak hanya melibatkan faktor ekonomi saja melainkan pada variabel penting politik dan sosio ekonomi seperti syariah, otoritas politik, manusia, harta benda atau kekayaan, pembangunan dan keadilan. Variabel-variabel dalam model pembangunan Ibnu Khaldun tersebut ditujukan untuk menciptakan kesejahteraan manusia di dunia maupun akhirat agar manusia dapat terbebas dari kemiskinan yang membedakan penelitian ini dengan penelitian tersebut adalah:

1. Objek penelitian ini adalah negara mayoritas Muslim ASEAN, yang mengambil sampel Negara Indonesia, Brunei Darussalam dan Malaysia, berbeda dengan penelitian tersebut yang objeknya merupakan 15 negara muslim yang tergabung dalam Organisasi Konferensi Islam.
2. Pada penelitian ini variabel syariah (S) dan keadilan (j) tidak digunakan, sebab konstitusi yang digunakan di negara mayoritas Muslim ASEAN tidak semuanya menggunakan konstitusi islam. Berbeda halnya dengan objek penelitian tersebut yang dilakukan di Negara Islam. Di dalam penelitian tersebut juga, variabel syariah tidak berpengaruh terhadap kemiskinan. Selain



itu juga didalan ekonomi tidak terdapat variabel keadilan serta susah untuk mengukurnya.

3. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah model regresi linier berganda yang kemudian dilakukan uji asumsi klasik.

Berdasarkan dari apa yang telah dipaparkan maka penulis membentuk variabel manifesnya sehingga model Ibnu Khaldun dalam peneltian ini sebagai berikut:

$$Miskin = f(GDPkap, SDI, Investasi, G.health, G.educ,) \quad (1.2)$$

Keterangan:

Miskin	= Jumlah penduduk miskin
GDPkap	= GDP per kapita
SDI	= Sumber Daya Insani
Investasi	= Total Investasi Negara
<i>G.health</i>	= Pengeluaran pemerintah di sektor kesehatan
<i>G.educ</i>	= Pengeluaran pemerintah di sektor pendidikan

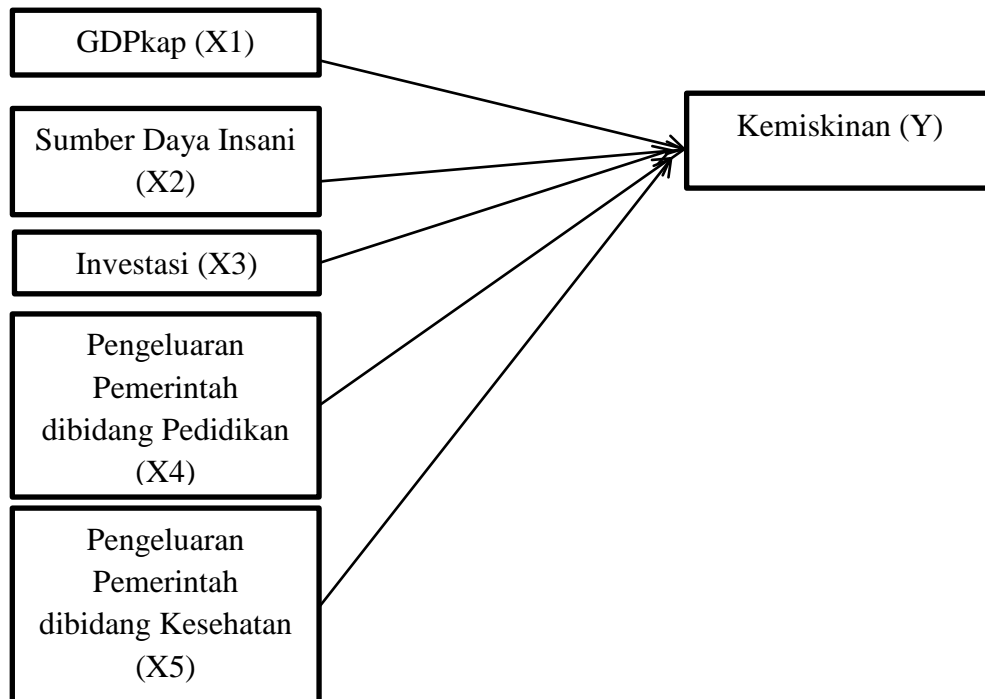
Berikut ini merukapan penjelasan dari fungsi tersebut:

- a. Kemiskinan merupakan masalah multidimensi yang disebabkan oleh banyak faktor. Menurut Badan Pusat Statistik (2015), kemiskinan adalah ketidakmampuan memenuhi standar minimum kebutuhan dasar yang meliputi kebutuhan makan maupun non makan. Untuk mengukur kemiskinan, BPS menggunakan konsep kemampuan memnuhi kebutuhan (*basic needs approach*). Jadi penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perulan dibawah garis kemiskinan.
- b. Pendapatan perkapita merupakan salah satu ukuran kemakmuran bagi tiap daerah. Semakin tinggi pendapatan tersebut maka semakin tinggi daya beli penduduk, dan daya beli yang bertambah ini akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Sukirno, 2006, hlm. 170). GDP perkapita merupakan hasil dari pendapatan domestik bruto dibagi dengan jumlah populasi penduduk.
- c. Sumber daya insani memiliki peran penting dalam pembangunan ekonomi, besar kecilnya potensi pertumbuhan ekonomi suatu negara akan sangat dipengaruhi oleh kualitas maupun kuantitas sumber daya manusianya. Kualitas sumber daya insani tersebut dapat dilihat dari indeks pembangunan

manusia (IPM) atau dikenal dengan *Human Development Index* (HDI) yang dikeluarkan oleh *United Nations Development Programme* (UNDP).

- d. Investasi merupakan penghubung yang kuat untuk pertumbuhan ekonomi dan pengurangan kemiskinan (Ocaya et al, 2012). Investasi dalam bidang perekonomian berpengaruh dalam pada naik turunnya tingkat perekonomian dari suatu wilayah, karena dengan adanya investasi akan terjadi peningkatan produksi dan kesempatan kerja yang akan berpengaruh pula terhadap kemiskinan.
- e. Pengeluaran pemerintah mencerminkan kebijakan pemerintah. Apabila pemerintah telah menetapkan suatu kebijakan untuk membeli barang dan jasa untuk pengeluaran pemerintah maka mencerminkan biaya yang harus dikeluarkan oleh pemerintah untuk melaksanakan kebijakan tersebut. Dalam suatu lingkaran setan kemiskinan terdapat tiga poros utama yang menyebabkan seseorang menjadi miskin yaitu 1) rendahnya tingkat kesehatan, 2) rendahnya pendapatan, dan 3) rendahnya tingkat pendidikan. Mahmudi (dalam Widodo, 2011, hlm. 21). Rendahnya tingkat kesehatan merupakan salah satu pemicu terjadinya kemiskinan karena tingkat kesehatan masyarakat yang rendah akan menyebabkan tingkat produktivitas menjadi rendah. Tingkat produktivitas yang rendah lebih lanjut menyebabkan pendapatan rendah, dan pendapatan yang rendah menyebabkan terjadinya kemiskinan. Kemiskinan itu selanjutnya menyebabkan seseorang tidak dapat menjangkau pendidikan yang berkualitas serta membayar biaya pemeliharaan dan perawatan kesehatan.

Berdasarkan pemaparan di atas, maka kerangka pemikiran dalam penelitian ini dapat digambarkan melalui gambar di bawah ini:



*Gambar 2. 2 Kerangka Pemikiran*

#### **2.4 Hipotesis Penelitian**

Berdasarkan kajian teori diatas, maka dirumuskan suatu hipotesis. Hipotesis dapat diartikan sebagai suatu jawaban yang bersifat sementara terhadap permasalahan penelitian, sampai terbukti melalui data yang terkumpul. Hipotesis akan diuji di dalam penelitian dengan pengertian bahwa uji statistik selanjutnya yang akan membenarkan atau menolaknya. Untuk menguji kebenaran penelitian ini, penulis akan mengajukan hipotesis sebagai berikut:

1. Terdapat pengaruh GDP per kapita terhadap tingkat kemiskinan di negara mayoritas muslim ASEAN.
2. Terdapat pengaruh sumber daya insani terhadap tingkat kemiskinan di negara mayoritas muslim ASEAN.
3. Terdapat pengaruh investasi terhadap tingkat kemiskinan di negara mayoritas muslim ASEAN.
4. Terdapat pengaruh pengeluaran pemerintah dibidang pendidikan terhadap Kemiskinan di negara mayoritas muslim ASEAN.
5. Terdapat pengaruh pengeluaran pemerintah dibidang kesehatan terhadap Kemiskinan di negara mayoritas muslim ASEAN.